

Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dalam Rangka Penanggulangan Banyaknya Anak Putus Sekolah di Kabupaten Brebes

Dwi Komalasari¹, Novia Wahyu Wardhani²
Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang,
Indonesia

Email: dwikomalasari2000@students.unnes.ac.id¹
noviawahyu@mail.unnes.ac.id²

Abstract. *Education is the right of every person as mandated by Article 31 of the 1945 Constitution. However, in reality, there are still many who have not obtained it, as in Brebes Regency, which still has cases of many children dropping out of school. This study aims to determine (1) the factors that cause school dropouts in Brebes Regency. (2) The efforts of the Brebes district government in alleviating ATS/APtS through the GKB program. (3) Obstacles to the implementation of the GKB program. This study used descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data validity techniques used triangulation of sources and methods. Data analysis used category collection, direct interpretation, pattern formation, and generalization. The results showed that (1) The causes of school dropout consist of internal and external factors. (2) The implementation of the program includes planning, implementation, evaluation, and sustainability. (3) Program constraints include budget, ATS/APtS dropping out again, FMPP operational assistance, poor monitoring and evaluation, and so on. The alleviation of ATS/APtS through the implementation of the GKB Program is carried out by the policy team and technical implementation team by coordinating and collaborating in its return.*

Keywords: *Implementation, Back to School Movement, Dropout Children.*

PENDAHULUAN

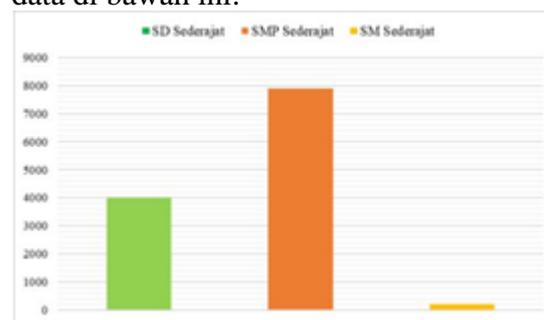
Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan, karena melalui pendidikan manusia dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Pendidikan dinilai sebagai bagian dari usaha yang dilakukan seseorang agar dapat memperoleh tuntunan hidup yang bermanfaat dan mendapatkan kebahagiaan hidup yang sempurna (Marwah et al., 2018). Pendidikan adalah hak yang dimiliki semua orang sebagaimana amanat dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, begitu pun pendidikan dasar adalah kewajiban setiap warga negara dan mereka diwajibkan untuk mengikutinya serta pendidikannya pun akan dibiayai oleh pemerintah (Nadziroh et al., 2018).

Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus dapat berkolaborasi dalam meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik lagi agar dapat menciptakan warga negara yang cerdas sekaligus memiliki kompetensi agar dapat memajukan serta mensejahterakan taraf hidup bangsa, sehingga dapat meningkatkan IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ini adalah tingkat status pembangunan manusia di suatu daerah yang berfungsi menjadi patokan dasar dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Humbang Hasundutan Regency, 2020).

Pada kenyataannya masih banyak ditemui problematika pendidikan di Indonesia. Misalnya saja meningkatnya angka anak tidak sekolah. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik pada Selasa, 21 Februari 2023 jumlah anak di Indonesia yang tidak sekolah dari jenjang SD hingga SMA dalam rentang waktu 2019-2020 ialah sejumlah 23.75% di tahun 2019 dan 22.31% di tahun 2020. Bahkan

menurut data hasil survei yang dilakukan oleh Dana Anak PBB (UNICEF) yang dikutip dalam Media Indonesia pada hari Rabu, 8 Maret 2023 menyatakan terdapat 1% atau sekitar 938 anak yang putus sekolah di Indonesia karena peristiwa pandemi. Menurut Hiroyuki Hattori selaku Chief of Education UNICEF yang dikutip dalam Media Indonesia pada hari Selasa, 21 Februari 2023 mengatakan bahwa anak dengan usia 7-18 tahun dinyatakan masih bersekolah dengan persentase sekitar 88% sedangkan 11% lainnya dinyatakan putus sekolah sebelum pandemi.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki permasalahan mengenai anak putus sekolah dan tidak sekolah (ATS/APtS). Di sana masih banyak ditemukan kasus anak putus sekolah yang rata-rata dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes yang menyatakan bahwa jumlah ATS/APtS di wilayah Brebes masih tergolong cukup tinggi. Hal tersebut dapat kita lihat pada data di bawah ini.



Bagan 1 Jumlah ATS/APtS di Kab. Brebes Tahun 2020-2022

Sumber: Dindikpora Kab. Brebes (2023)

Perolehan data pada diagram tersebut, ditemukan jumlah ATS/APtS pada jenjang SD Sederajat sebanyak 3996, sedangkan pada jenjang SMP Sederajat ditemukan sebanyak 7910, terakhir pada jenjang SM Sederajat berjumlah 80. Meningkatnya

jumlah ATS/APtS tentu akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan akan berdampak pada kualitas IPM. Berdasarkan perolehan data dari Dindikpora yang sudah disebutkan di atas mengenai banyaknya ATS/APtS di Kabupaten Brebes, menjadikan IPM Kabupaten Brebes masuk dalam kategori paling rendah dibanding dengan daerah lainnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes hanya mencapai 66.23% saja dari IPM ideal Jawa Tengah yang mencapai 72.16% yang akhirnya menjadikan Kabupaten Brebes menempati posisi ke-35 dari kabupaten/kota lainnya yang ada di Jawa Tengah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengukuran IPM pada bidang pendidikan dilakukan dengan cara memakai dua alat hitung yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Menurut Rifai, dalam (Usman et al., 2017), angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan sebagai indikator yang mewakili variabel pendidikan dan memberikan pengaruh positif pada IPM. Tidak hanya itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga dinilai memiliki hubungan yang signifikan dan berpengaruh pada IPM (Arofah & Rohimah, 2019).

Rendahnya IPM Kabupaten Brebes salah satunya diakibatkan oleh kualitas pendidikan di wilayah tersebut yang dinilai belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus ATS/APtS. Salah satu alternatif solusi yang dilakukan pemerintah ialah dengan mengimplementasikan Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Program ini bertujuan untuk mengentaskan permasalahan ATS/APtS sekaligus mengakselerasikan percepatan IPM Kabupaten Brebes. Dengan demikian, berdasarkan apa yang diperoleh dari penjelasan tersebut di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dalam Rangka Penanggulangan

Banyaknya Anak Putus Sekolah di Kabupaten Brebes.

Adapun referensi penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung yaitu penelitian dari Sukmawan, et.al (2022) mengenai Studi Tentang Penurunan Jumlah Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten Pekalongan (Sebuah Kajian Analisis Jejaring). Pemerintah setempat melakukan kolaborasi untuk mengentaskan permasalahan anak tidak sekolah dengan menggandeng beberapa stakeholder seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, masyarakat hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, merujuk pada latar belakang di atas terdapat sebuah persamaan fenomena sosial tentang ATS/APtS. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam karya ilmiah skripsi dengan judul “Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dalam Rangka Penanggulangan Banyaknya Anak Putus Sekolah di Kabupaten Brebes”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang memaparkan, mengkaji, dan menganalisis fenomena sosial tentang pengentasan ATS/APtS melalui implementasi Program GKB. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan metode. Terakhir, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan kategori, interpretasi langsung, pembentukan pola, dan generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

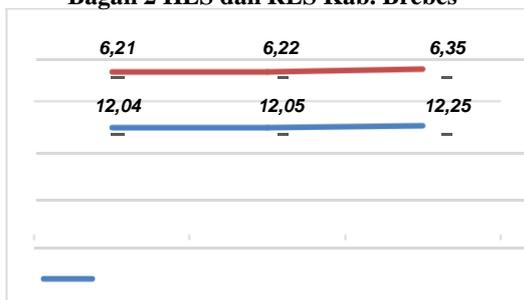
Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Juli 2017 yang diresmikan dengan SK Bupati Brebes dan memiliki regulasi pada Peraturan Bupati Brebes No. 49 Tahun

2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes. Sasaran program menurut Peraturan Bupati Brebes Nomor 49 Tahun 2022 ialah sebagai berikut.

- a. Anak yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah SD/MI atau pendidikan yang sederajat.
- b. Anak yang telah lulus SD/MI atau pendidikan yang sederajat, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMP/MTS atau pendidikan yang sederajat.
- c. Anak yang telah lulus SMP/MTS atau pendidikan yang sederajat, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMA/SMK/MA atau pendidikan yang sederajat.
- d. Anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan dua belas tahun.

Program GKB memiliki tujuan untuk mengentaskan permasalahan ATS/APtS yang dinilai menyebabkan rendahnya IPM Kabupaten Brebes. Selain itu, adanya Program GKB diharapkan dapat membantu percepatan penuntasan wajib belajar 12 tahun dan pemenuhan hak anak sekaligus untuk memperbaiki IPM Kabupaten Brebes. Perlu kita ketahui, aspek pendidikan pada pengukuran IPM dilihat dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Di Kabupaten Brebes sendiri angka HLS dan RLS dapat dilihat dari bagan berikut.

Bagan 2 HLS dan RLS Kab. Brebes



Sumber: BPS Kab. Brebes (2023)

Berdasarkan perolehan data di atas, dapat dikatakan jika angka HLS dan RLS di Kabupaten Brebes, setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Kenaikan tersebut dikarenakan keberhasilan implementasi Program GKB sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Brebes (tim kebijakan) dan masyarakat/FMPP (tim pelaksana teknis) dalam mengentaskan permasalahan ATS/APtS. Pengentasannya dilakukan dengan cara mengembalikan ATS/APtS ke sekolah baik ke jenjang pendidikan formal maupun non-formal, dan nantinya akan diberikan dana bantuan pendidikan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Adapun rincian pagu pemberian bantuan biaya pendidikan di Program GKB Brebes yaitu sebagai berikut.

- a. Siswa SD/MI sebesar Rp800.000/siswa setiap 1 (satu) tahun.
- b. Siswa Paket A sebesar Rp800.000/siswa setiap 1 (satu) tahun.
- c. Siswa SMP/MTS sebesar Rp1.000.000/siswa setiap 1 (satu) tahun.
- d. Siswa Paket B sebesar Rp1.200.000/siswa setiap 1 (satu) tahun.
- e. Siswa SMA/SMK/MA sebesar Rp1.400.000/siswa setiap 1 (satu) tahun.
- f. Siswa Paket C sebesar Rp1.400.000/siswa setiap 1 (satu) tahun.

Perlu kita ketahui, baik atau tidaknya kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah perbandingan antara jumlah siswa dari kelompok usia sekolah tertentu yang aktif bersekolah di berbagai jenjang pendidikan dengan total populasi usia sekolah yang sesuai. APK adalah proporsi siswa pada tingkat pendidikan tertentu dalam

kelompok usia yang sesuai dengan tingkat pendidikan tersebut. Sedangkan APM adalah proporsi siswa pada kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan usia mereka.

Tabel 1 APS Kab. Brebes

Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)								
7-12			13-15			16-18		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
99,44	99,65	99,99	94,64	95,37	94,93	50,17	51,61	56,13

Sumber: BPS Prov. Jateng (2021)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Brebes pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,99 persen. Sedangkan APS untuk kelompok umur 13-15 tahun mengalami penurunan, terakhir sebesar 94,93 persen. Terakhir APS untuk kelompok umur 16-18 tahun mengalami kenaikan terakhir sebesar 56,13 persen.

Tabel 2 APK Kab. Brebes

Kabupaten Brebes	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2019	2020	2021
SD Sederajat	100,57	102,98	102,67
SMP Sederajat	67,96	95,54	97,74
SM Sederajat	66,04	67,85	72,05

Sumber: Kemendikbud (2022)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Brebes pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan, terakhir sebesar 102,67 persen untuk jenjang SD sederajat. Kenaikan untuk jenjang SMP sederajat terakhir sebesar 97,74 persen. Sedangkan kenaikan untuk jenjang SM sederajat terakhir sebesar 72,05 persen.

Tabel 3 APM Kab. Brebes

Kabupaten Brebes	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	2019	2020	2021
SD Sederajat	92,79	93,09	93,87

SMP Sederajat	74,63	68,49	68,3
SM Sederajat	50,20	67,85	47,7

Sumber: Kemendikbud (2022)

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Brebes pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan, terakhir sebesar 93,87 persen untuk jenjang SD sederajat. Penurunan untuk jenjang SMP sederajat terakhir sebesar 68,3 persen. Sedangkan penurunan untuk jenjang SM sederajat terakhir sebesar 47,7 persen.

Faktor Penyebab ATS/APtS

a. Faktor Internal

1. Motivasi Diri

ATS/APtS memilih untuk putus sekolah/tidak bersekolah salah satunya disebabkan oleh rasa malas karena tidak memiliki motivasi. Selain itu, ada beberapa kasus di mana anak memilih putus sekolah karena merasa tidak mampu untuk memahami pelajaran. Hal tersebut yang pada akhirnya menjadikan anak merasa putus asa dan tidak bersemangat untuk bersekolah.

2. Dukungan Orang Tua

Terkadang ada anak yang sudah memiliki motivasi diri untuk lanjut bersekolah, tetapi tidak mendapat dukungan dari orang tua. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa orang tua yang merasa repot dengan pekerjaannya yang pada akhirnya menyuruh anaknya tersebut untuk berhenti sekolah dan mereka akhirnya diminta untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Ada juga orang tua yang menyuruh anak (terutama yang berstatus sebagai kakak) untuk mengasuh adiknya dikarenakan orang tuanya harus bekerja.

3. Kondisi Ekonomi

Di Kabupaten Brebes sendiri, masih banyak ditemukan masyarakat kurang mampu yang masih kesulitan secara ekonomi. Mengingat Brebes ini

merupakan salah satu daerah cukup ekstrem tingkat kemiskinannya, dan pada akhirnya menyebabkan banyak orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya, sehingga anak-anak memilih untuk bekerja dibanding sekolah.

b. Faktor Eksternal

1. Pergaulan

Di Kabupaten Brebes seringkali ditemukan anak jalanan atau punk yang disebabkan karena dampak negatif dari pergaulan kurang baik sehingga menyebabkan mereka tidak mementingkan pendidikan. Berdasarkan perolehan data dari Dinsos Kab. Brebes, jumlah anak jalanan di Brebes setiap tahunnya (dari rentang tahun 2020-2022) mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 57.14%. Dengan demikian, pergaulan atau lingkungan yang tidak baik turut menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya ATS/APtS di Kabupaten Brebes.

2. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat, rata-rata disebabkan karena kebiasaan atau adat istiadat setempat. Bagi yang masih tinggal di wilayah pedesaan, kebanyakan dari mereka memiliki perspektif kecil terhadap pendidikan yang menganggap sekolah itu tidak terlalu penting terutama bagi perempuan, karena menurut sebagian masyarakat tersebut menilai tugas perempuan adalah di dapur.

Banyak kasus dimana masyarakat pedesaan justru lebih memilih untuk menikah cepat, karena jika tidak segera menikah seringkali dianggap sebagai perawan tua (anak perempuan). Bagi orang tua yang masih kesulitan ekonomi, tentu mereka akan mendukung anak perempuannya untuk segera menikah dengan anggapan jika anak perempuannya sudah menikah,

otomatis anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungannya, karena tanggungannya sudah berubah menjadi tanggungan suami.

Menurut data yang dikutip dari Brebes news pada Jumat, 3 November 2023 terdapat lonjakan kurang lebih 291 anak di Kabupaten Brebes yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dalam kurun waktu 2021 - 2022. Permohonan dispensasi tersebut, terdiri dari akumulasi perkara yang ditangani sejak Januari – Juni 2022, dan terdapat sekitar 257 permohonan dispensasi yang sudah disetujui dari majelis hakim. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, permohonan dispensasi di semester pertama tahun 2022 lebih dari 50 persen. Hal ini membuktikan bahwa permohonan dispensasi nikah di tahun 2022 lebih banyak dibanding tahun 2021.

3. Geografis

Jika dilihat secara geografis sendiri, wilayah Kabupaten Brebes memang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Brebes Utara (Brebes Kota) dan Brebes Selatan. Kedua wilayah tersebut ternyata memiliki perbedaan terkait faktor yang melatarbelakangi anak putus sekolah, untuk wilayah Brebes Utara sendiri yang memang daerahnya adalah dataran rendah, kebanyakan dari mereka yang putus sekolah mengaku karena kondisi ekonomi yang sulit, yang mana menyebabkan mereka harus bekerja.

Berbeda halnya dengan wilayah Brebes Selatan, faktor geografis justru menjadi tantangan, mengingat memang daerahnya adalah dataran tinggi dan banyak wilayahnya yang curam, sehingga menyebabkan transportasi umum dan fasilitas di sana cukup sulit dibanding wilayah bagian utara, hingga pada akhirnya membuat anak memilih

putus sekolah. Meskipun demikian, Brebes Selatan dinilai lebih aware terhadap pendidikan dibanding dengan masyarakat Brebes Utara. Di wilayah selatan ini, masyarakatnya justru sangat mementingkan pendidikan. Hebatnya mereka diharuskan menempuh pendidikan minimal hingga lulus SMA.

Implementasi Program GKB

Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) selain bertujuan untuk mengentaskan ATS/APtS dan mengakselerasikan IPM, juga berfungsi untuk meregulasikan percepatan tuntas wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan pendidikan 12 tahun, sebagaimana merujuk pada dasar kebijakan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Wijaya, 2012). Adapun sebaran data terkait jumlah ATS/APtS (Drop Out dan Lulus Tidak Melanjutkan) dalam kurun waktu 2020-2022 di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Sebaran Jumlah ATS/APtS

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun
		2020-2022
1.	SD Sederajat	3996
2.	SMP Sederajat	7877
3.	SM Sederajat	59
Total		11953

Sumber: Dindikpora Kab. Brebes (2023)

Berdasarkan perolehan data dari tabel di atas, dapat ditarik sebuah pernyataan jika jumlah ATS/APtS di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 3 tahun terakhir memang dinilai sangat banyak dan dari tahun ke tahun jumlahnya bertambah mengingat ATS/APtS ini sifatnya tambal sulam sehingga menjadikan datanya dinamis karena mudah berubah. Hal tersebut juga disebabkan masih banyak ditemukan kasus dimana ATS/APtS yang sudah berhasil dikembalikan tetapi justru keluar kembali di tengah jalan. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Brebes tetap berkomitmen untuk mengatasi

permasalahan tersebut dengan cara mengembalikan ATS/APtS agar kembali bersekolah, baik ke jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Berikut merupakan sebaran data terkait rekapitulasi siswa GKB pada jenjang pendidikan formal di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022.

Tabel 5 Rekapitulasi Siswa GKB Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	SD Sederajat	216	222	384
2.	SMP Sederajat	523	450	608
3.	SM Sederajat	351	371	622
Total		1090	1043	1614

Sumber: Dindikpora Kab. Brebes (2023)

Berdasarkan perolehan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembalian ATS/APtS melalui implementasi Program GKB pada jenjang pendidikan formal yaitu tingkat SD sederajat - SM sederajat di tahun 2020 terdapat ATS/APtS sebanyak 1090 yang berhasil dikembalikan, kemudian di tahun 2021 terdapat penurunan sedikit dari tahun sebelumnya karena hanya mengentaskan sebanyak 1043, terakhir di tahun 2022 ternyata mengalami kenaikan dibanding dengan 2 tahun sebelumnya karena berhasil mengembalikan sejumlah 1614. Kemudian untuk sebaran data terkait rekapitulasi siswa GKB pada jenjang pendidikan non-formal di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7 Rekapitulasi Siswa GKB Non-Formal

No.	Kesetaraan	Tahun	
		2021	2022
1.	Paket A	57	86
2.	Paket B	1557	1710
3.	Paket C	3671	3414

Sumber: Dindikpora Kab. Brebes (2023)

Berdasarkan perolehan data di atas, dapat dikatakan bahwa pengembalian ATS/APtS melalui implementasi Program GKB pada jenjang pendidikan non-formal

setiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali di tahun 2022 untuk kesetaraan Paket C. Adapun implementasi Program GKB dalam rangka meringankan permasalahan ATS/APtS di Kabupaten Brebes meliputi sebagai berikut.

a. Perencanaan

1. Mendata ATS/AptS

Pemerintah Kabupaten Brebes akan menggandeng beberapa stakeholder seperti FMPP, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, UPT Dinas Pendidikan, dll. Awal mulanya FMPP akan turun langsung di lapangan untuk mencari dan mendata. Tetapi setelah adanya SIPBM, FMPP akan menginstruksikan kepada pemerintah desa untuk membantu dalam menjangkau ATS/APtS. SIPBM ini merupakan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat yang dapat memberikan dukungan signifikan untuk mendata dan menjangkau ATS/APtS melalui data by name dan by address, yang tentunya lebih lengkap dan mudah dijangkau di seluruh desa yang ada di Kabupaten Brebes. Untuk memperoleh data ATS/APtS di SIPBM, admin desa akan melihatnya di portal web/aplikasi tersebut yang hanya bisa diakses menggunakan akun pemerintah desa masing-masing, dan kemudian nantinya data tersebut akan diserahkan kepada FMPP. Selanjutnya FMPP akan melakukan konfirmasi untuk mendatangi ATS/APtS dan setelahnya akan dirayu, ditanya, dan diajak untuk kembali bersekolah.

2. Sosialisasi

Pada awal pembentukan Program GKB, Pemerintah Kabupaten Brebes sempat melakukan sosialisasi di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan program kepada masyarakat dan mengajaknya untuk saling bahu-membahu dalam menjangkau ATS/APtS serta membantu mereka agar

dapat kembali bersekolah. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua stakeholder. Sosialisasi ini dilakukan baik secara luring/daring melalui media-media di Kabupaten Brebes. Saat ini sosialisasi sudah jarang dilakukan mengingat sebagian masyarakat sudah masif mengenal Program GKB. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mencari dan melaporkan kepada FMPP ketika anaknya ingin kembali bersekolah tetapi terkendala biaya sehingga mereka tidak mampu, nantinya FMPP akan membantu masyarakat.

3. Penggalangan Dana

Anggaran yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, dan APBDes ternyata dinilai masih belum mampu untuk menganggarkan pelaksanaan Program GKB. Hal tersebut dikarenakan masih banyak desa yang belum mau menganggarkan APBDes untuk membantu pelaksanaan program. Perlu kita ketahui, setiap tahunnya ATS/APtS mengalami kenaikan/penurunan. Mengingat sifatnya yang tambal sulam sehingga menjadikan datanya dinamis. Sehingga ketika dana yang disediakan hanya sekitar 1,5 Miliar saja, maka Pemerintah Kabupaten Brebes hanya mampu mengembalikan sekitar 1000 orang saja pertahunnya, terlebih untuk mengembalikan ATS/APtS ini sifatnya merawat hingga lulus (sampai 12 tahun wajib belajar). Maka tak heran jika dananya masih belum mampu mengembalikan target yang lebih banyak lagi. Hingga pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan penggalangan dana kepada donatur, yayasan, atau perusahaan untuk membantu dalam pelaksanaan program dengan harapan mampu mengembalikan target yang lebih banyak lagi sehingga penuntasannya menjadi lebih cepat.

4. Regulasi

- a) Tahun 2015 - 2017: sebuah forum pemerhati pendidikan di Kabupaten Brebes yang dikenal dengan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mengembalikan ATS/APtS yang saat itu jumlahnya sangat banyak. Pada saat itu, belum ada payung hukum/regulasi yang menaungi kegiatan tersebut sehingga penganggarannya melalui skema pola orang tua asuh (donatur) untuk membiayai pengembalian ATS/APtS.
- b) Tahun 2017: Pemerintah Kabupaten Brebes mulai melirik program ini dan mengadopsinya sehingga pada akhirnya memiliki payung hukum/regulasi tepatnya pada Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2022. Peraturan tersebut bertujuan untuk menuntaskan permasalahan ATS/APtS, percepatan penuntasan wajib belajar 12 tahun, pemenuhan hak anak dengan harapan dapat mengakselerasi percepatan IPM Kabupaten Brebes khususnya bidang pendidikan.

b. Pelaksanaan

1. Rekonfirmasi

Data yang sudah diperoleh sebelumnya akan digunakan untuk rekonfirmasi oleh FMPP dengan cara mendatangi ATS/APtS dan nantinya akan mengajak ATS/APtS untuk kembali bersekolah.

2. Pengembalian

Ketika proses pengembalian, sebelumnya FMPP akan memastikan kembali terkait kelengkapan dokumen dari ATS/APtS, jika terdapat dokumen yang belum lengkap misalnya KK/Akta kelahiran, dll. Maka FMPP akan membantu ATS/APtS untuk mengurus dokumen tersebut ke kantor kelurahan/desa masing-masing.

3. Pembuatan SK

Sebelum mendapatkan SK Bupati tentang penetapan sasaran Program GKB, ATS/APtS membuat pernyataan kesediaan untuk kembali bersekolah yang diketahui oleh orang tua dan pemerintah desa. Setelah itu pemerintah desa memberikan data ATS/APtS ke pemerintah kecamatan. Kemudian pemerintah kecamatan membuat SK yang ditujukan ke sekolah sasaran dan pihak sekolah akan membuat SK berisi pernyataan bahwa ATS/APtS tersebut adalah siswa aktif dan nantinya pemerintah kecamatan akan mengirimkan SK tersebut ke sekretariat Tim GKB dan akan ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Brebes. Setelah Tim Sekretariat GKB mengirim SK ke Pemerintah Kabupaten Brebes, langkah selanjutnya data yang terdapat pada SK tersebut akan dipilah kembali, bagi yang sesuai kriteria akan dibuatkan SK Bupati tentang penetapan sasaran Program GKB. Di dalam SK Bupati tersebut terdapat kode Virtual Account (VA) yang nantinya akan digunakan untuk proses pencairan bantuan sosial dana pendidikan dari Program GKB secara tunai di bank.

4. Pendampingan

Setelah ATS/APtS sudah berhasil dikembalikan ke sekolah, FMPP akan memonitoring mereka untuk mengetahui perkembangannya dengan cara berkoordinasi bersama pihak sekolah atau orang tuanya. Pendampingan ini dilakukan secara langsung (mendatangi sekolah atau home visit) dan biasanya kegiatan monitoring tersebut dilakukan secara tidak langsung (via WhatsApp). Jika tidak dimonitoring dengan baik dikhawatirkan ATS/APtS rentan untuk putus kembali di tengah jalan.

c. Evaluasi

Setiap tahunnya, Pemerintah

Kabupaten Brebes mengadakan monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder yang terkait (tim kebijakan dan pelaksana teknis). Evaluasi ini dilakukan untuk melihat perkembangan/ progres dari pelaksanaan Program GKB dengan cara mengukur dan menganalisis efektivitas, efisiensi, dan dampak yang dihasilkan dari berjalannya program. Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Membandingkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
- 2) Mengetahui penggunaan strategi yang sudah dipakai di dalam pelaksanaan program apakah sudah tepat atau belum.
- 3) Menemukan perbaikan atau solusi untuk kendala yang terjadi saat pelaksanaan program.

d. Keberlanjutan

Program GKB Kabupaten Brebes akan dipastikan tetap berlanjut untuk memberikan manfaat jangka panjang. Keberlanjutan program ini salah satunya ialah untuk memastikan bahwa di dalamnya memiliki dampak positif untuk membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kabupaten Brebes. Terutama untuk meningkatkan derajat kualitas pendidikan dan derajat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi Kabupaten Brebes yaitu melalui pemenuhan hak memperoleh pendidikan.

Kendala Program GKB

a. Anggaran

Banyaknya jumlah ATS/APtS yang semakin tahun semakin bertambah karena sifatnya tambal sulam dan mengakibatkan datanya dinamis membuat anggaran yang sudah dialokasikan untuk pelaksanaan program menjadi cukup terbebani,

mengingat alokasi dananya sangat terbatas berbanding terbalik dengan jumlah ATS/APtS yang dinilai cukup banyak. Sehingga Pemerintah Kabupaten Brebes hanya mampu mengembalikan sekitar 1000 ATS/APtS setiap tahunnya.

b. ATS/APtS yang putus kembali

Di lapangan masih banyak ditemukan kasus ATS/APtS yang sebelumnya sudah berhasil dikembalikan ke sekolah tetapi putus kembali di tengah jalan. Hal tersebut disebabkan karena ATS/APtS belum mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan terkadang ada beberapa kasus dimana ATS/APtS terbawa kembali ke dalam pergaulan yang kurang baik sama seperti pergaulan sebelumnya.

c. Database ATS/APtS

Berawal dari kasus ATS/APtS yang sebelumnya sudah dikembalikan tetapi keluar lagi, menjadikan database ATS/APtS di Dindikpora Kabupaten Brebes seringkali ditemukan data yang belum diperbarui. Akibatnya akan berdampak pada proses pencairan karena *database* yang kacau.

d. Bantuan operasional FMPP

Meskipun sebelumnya berawal dari sifat sukarelawan tetapi pada kenyataannya, FMPP membutuhkan bantuan operasional untuk menunjang kegiatan mobilitasnya ketika menjangkau, mendata, dan mendampingi ATS/APtS di lapangan. Setidaknya walaupun tidak mendapatkan reward atau honor, FMPP berharap diberikan dana bantuan operasional yang layak oleh pemerintah, mengingat mereka sudah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran.

e. Tidak ada motivasi dan dukungan orang tua

Terkadang ada beberapa ATS/APtS yang sudah diizinkan oleh orang tuanya

untuk kembali bersekolah tetapi ATS/APtS tersebut belum bersedia kembali dikarenakan masih terbawa pergaulan kurang baik atau masih memiliki rasa malas untuk bersekolah. Sebaliknya, ada juga kasus dimana ATS/APtS sudah bersedia kembali bersekolah tetapi belum diizinkan oleh orang tua dikarenakan orang tuanya tersebut bersikeras ingin anaknya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibanding sekolah.

f. Monev kurang terjalin dengan baik

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dinilai masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan pemerintah seringkali menggunakan solusi ditahun sebelum-sebelumnya meskipun dengan permasalahan yang berbeda. Seharusnya pemerintah dapat berinovasi lebih inovatif lagi untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang ada. Selain itu, monev antara FMPP dengan kepala sekolah/orang tua maupun ATS/APtS juga dinilai belum efektif. Hal tersebut dikarenakan FMPP adalah relawan yang tidak diberi honor/reward oleh pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa memaksa FMPP untuk selalu memonitoring ATS/APtS. Mengingat FMPP juga memiliki kesibukan lain.

Implementasi Program GKB dalam Teori Fungsionalisme Struktural: Talcott Parsons

Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons sering dikenal dengan teori AGIL. AGIL merupakan singkatan dari Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency. AGIL ini adalah salah satu kerangka teoritis dalam keilmuan sosiologi yang digunakan untuk menganalisis bagaimana cara masyarakat dapat berfungsi sekaligus berinteraksi. Adapun keterkaitan antara teori ini dengan Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dalam Rangka Penanggulangan Banyaknya Anak Putus Sekolah di

Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

a. Adaptasi (*adaptation*)

Program GKB adalah respon dari permasalahan ATS/APtS di Kabupaten Brebes. Konsep adaptasi mengacu pada kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan hidupnya dengan sebuah perubahan. Di dalam konteks penanggulangan ATS/APtS, Program GKB adalah respon terhadap permasalahan ATS/APtS yang dapat dilihat sebagai upaya adaptasi dari tantangan pendidikan di Kabupaten Brebes. Implementasi program ini bertujuan untuk mengubah dan memperbaiki kualitas pendidikan dengan kondisi nyata yang sedang terjadi di Kabupaten Brebes.

b. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Pengentasan ATS/APtS di Kabupaten Brebes melalui implementasi program. Tujuan utama dalam permasalahan ATS/APtS di Kabupaten Brebes yaitu untuk mengurangi, menekan, bahkan menghilangkan kasus ATS/APtS dan juga mengakselerasi percepatan IPM Brebes. Konsep Goal Attainment atau pencapaian tujuan ini dapat dicapai dengan adanya implementasi Program GKB.

c. Integrasi (*integration*)

Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder (tim kebijakan dan tim pelaksana teknis). Integrasi dalam hal ini mengacu pada koordinasi dan kolaborasi beberapa stakeholder yang berkaitan untuk meraih tujuan bersama yaitu mengentaskan ATS/APtS di Kabupaten Brebes. Koordinasi dan kolaborasi ini sangat penting dilakukan agar dapat meraih apa yang sebelumnya diinginkan. Tim kebijakan terdiri dari bupati, sekretaris daerah, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Baperlitbangda, Dindikpora, Kemenag, Dinpermades, dll. Sedangkan tim pelaksana teknis terdiri dari FMPP, kepala sekolah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ATS/APtS, dan orang tuanya.

d. Latensi (*Latency*)

Perbaikan perspektif masyarakat Kabupaten Brebes terhadap pendidikan. Dalam konteks ini, latensi merujuk pada pemeliharaan nilai dan norma sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya saja seperti pemeliharaan nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan yang ada pada implementasi Program GKB ini berhasil merubah perspektif masyarakat Brebes terhadap pendidikan. Dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya memperoleh hak pendidikan. Perubahan perspektif ini tentu jelas mendukung program percepatan penuntasan wajib belajar 12 tahun.

Penutup Simpulan

Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dalam Rangka Penanggulangan Banyaknya Anak Putus Sekolah di Kabupaten Brebes, setelah dianalisis dari faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah yang berasal dari faktor internal meliputi motivasi diri, dukungan orang tua, dan kondisi ekonomi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pergaulan, sosial budaya, dan geografis. Dengan demikian, untuk mengentaskan permasalahan tersebut dilakukan dengan cara mengimplementasi program GKB sebagai upaya untuk menuntaskan ATS/APtS yang meliputi perencanaan (mendata ATS/APtS, sosialisasi, penggalangan dana, dan regulasi), pelaksanaan (rekonfirmasi, pengembalian, pembuatan SK, dan pendampingan), evaluasi dengan melaksanakan rapat koordinasi, serta keberlanjutan yang akan membuat Program GKB selalu terlaksana agar dapat menuntaskan permasalahan ATS/APtS di Kabupaten Brebes dengan harapan dapat memperbaiki IPM Brebes.

Sementara untuk kendala Program GKB terdiri dari pendanaannya yang

terbatas, ATS/APtS yang sudah dikembalikan tetapi putus kembali di tengah jalan, pencairan dana bantuan menjadi kendala mengingat masih banyak data ATS/APtS yang tidak tercantum dalam SK bupati dikarenakan database yang belum diperbaharui, biaya operasional untuk FMPP yang belum terpenuhi dengan baik, tidak adanya motivasi diri atau dukungan dari orang tua turut menjadi kendalanya, terakhir yang menjadi kendala ialah monitoring dan evaluasi antar stakeholder yang kurang terjalin dengan baik.

Saran

Adapun saran yang diberikan dari peneliti berdasarkan penelitian Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dalam Rangka Penanggulangan Banyaknya Anak Putus Sekolah di Kabupaten Brebes yaitu pemerintah dapat memperbaiki dan memperkuat tim pelaksana teknis (FMPP) dalam pelaksanaan Program GKB. Tidak hanya itu, pemerintah harus dapat mengatasi keterbatasan anggaran agar tidak selalu mengandalkan dari dana APBD, DAK APBN, CSR saja. Sasaran penggalangan dananya harus lebih banyak lagi. Misalnya dengan melakukan kerjasama atau penggalangan dana yang lebih luas lagi ke perusahaan baik itu BUMN/BUMS, atau dengan menggunakan sistem pola orang tua asuh, sama halnya ketika GKB tahun 2015 ketika belum memiliki payung hukum/regulasi.

Pemerintah juga harus dapat mengajak semua pemerintah desa agar mereka mau mengalokasikan dana pendidikan dari APBDes untuk kepentingan pelaksanaan program guna mencapai target pengentasan ATS/APtS yang lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Selanjutnya, jika pemerintah sudah memberikan bantuan operasional yang cukup, sebaiknya FMPP meningkatkan kegiatan monevnya kepada ATS/APtS, pihak sekolah, dan orang tua. Sehingga pendampingan yang dilakukan

pun akan berjalan dengan optimal. Terakhir pihak sekolah maupun orang tua juga harus turut andil untuk melaporkan perkembangan anak (ATS/APtS) kepada FMPP. Sehingga dalam hal ini, tidak hanya FMPP saja yang berperan untuk mendampingi ATS/APtS tetapi semua stakeholder turut berperan untuk mendukung keberhasilan program dalam mengentaskan ATS/APtS.

Daftar Pustaka

- Arofah, I., & Rohimah, S. (2019). *Analisis Jalur Untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Masyarakat Melalui Pengeluaran Riil Per-Kapita Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Sainatika Unpam, 2(1), 76–87.
- Humbang Hasundutan Regency, B.-S.I. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan*.
- Marwah, S. S., Syafe'i, M., & Sumarna, E. (2018). *Relevansi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara Dengan Pendidikan Islam*. Tarbawy : Indonesian Journal of Islamic Education : Indonesian Journal of Islamic Education, 5(1), 14.
- Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Di Indonesia. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An, 4(3), 400–405.
- Usman, M., Wamiliana, & Tampubolon, M. S. (2017). *Seminar Nasional Metode Kuantitatif 2017*.
- Wijaya, I. D. R. (2012). *Menyoal Prospek Program Wajib Belajar 12 Tahun*.
- Sukmawan, P. J., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). *Studi Tentang Penurunan Jumlah Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten Pekalongan (Sebuah Kajian Analisis Jejaring)*. 21(1), 1–9.
- Bpd.go.id. (2019-2020). *Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin 2019-2020*. Diakses pada 21 Februari 2023 dari https://www.bps.go.id/indicator/28/19/86/1/a_____angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html
- Brebesnews.co. (2022, 9 Juli). *Belum Cukup Umur, 291 Anak Ajukan Dispensasi Nikah*. Diakses pada 3 November 2023, dari <https://brebesnews.co/2022/07/belum-cukup-umur-291-anak-ajukan-dispensasi-nikah/>
- (2020,19 Februari). *Daerah-Abai Pendidikan Capaian IPM Rendah*. Diakses pada 21 Februari2023, dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/290966/daerah-abaipendidikan-capaian-ipm-rendah>
- Mediaindonesia.com. (2020, 24 Desember). *Unicef Sebut 938 Anak Indonesia Putus Sekolah*. Diakses pada 8 Maret 2023, dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/371317/unicef-sebut-938-anak-indonesia>